

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

The Liang Gie, 2018, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,

Inu Kencana Syafiie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta,

Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Jogjakarta,

Alwi Smith, 2016, *Implementasi Kebijakan Persampahan*. Sleman, Deepublish.

Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafinindo, Depok,

Tahir Azhari Suati, 2007, *Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Syaful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung jawab hukum pemerintahan daerah dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup*, Alumni, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Prajudi Atmosudirdjo, 1984, *Hukum Admistrasi Negara*, Penerbit Ghalia, Jakarta.

Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PolGov.,

B. Hasil Penelitian (Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi)

Muhammad Syarif Nuh. 2012, *Hakikat Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Dalam *ejournal Undip*

jilid 41 no.1 *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar*,
hlm. 55-56

I Wayan Suandi. 2013, Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.1 No.1,

Marsuyetno. 2013, Analisi Implementasi Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup do sumatera utara. *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik*. Dalam *jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.2, hlm, 275.

Anis zakaria Kama, 2012, Dalam Disertasi Hakekat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, *Program doktor ilmu hukum universitas muslim Makasar*,

Norhana, 2016, Implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara, Dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5,

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017, Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Uin sunan gunung djati. Dalam *jurnal Publik*, Volume 11 Nomor 1,

Yuliana, 2020, Corona Virus Disiseses (Covid-19) Sebuah Tinjaun Literatur Tentang Covid-19, *jurnal Welnes And Healthy Maga*, Volume 2 Nomor 1,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah

D. Internet/Website

<https://kbbi.web.id/pandemi.html>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://www.kompas.com/tag/data+virus+corona+di+dunia>, diakses tanggal 19 April 2021

www.covid19.go.id diakses tanggal 19 April 2021

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengangan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, <https://animulyana.blogspot.com/>, diakses tanggal 19 April 2021

<http://www.jemberkab.go.id/pemkab-jember-anggarkan-rp-400-miliar-untuk-penanganan-covid-19/>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://surabaya.liputan6.com/read/4385697/kasus-covid-19-jember-meningkat-tajam-selama-sepekan-terakhir/>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935355/who-resmi-nyatakan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://www.kompas.com/tag/data+virus+corona+di+dunia>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://covid19.kemkes.go.id/downloads/#.X5ZzE6ozbIU>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://jatim.antaranews.com/berita/405126/anggaran-covid-19-di-jember-terbesar-kedua-namun-minim-keterbukaan-informasi>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://www.jawapos.com/jpg-today/06/05/2020/akademisi-peduli-jember-kritisi-kebijakan-penanganan-covid-19/>, diakses tanggal 19 April 2021

<http://litbang.kemendagri.go.id/website/data/media/2017-03.pdf>, diakses tanggal 19 April 2021

<https://www.antaraneews.com/berita/1660726/minim-keterbukaan-informasi-saat-anggaran-covid-19-jember-rp479-miliar>, diakses tanggal 19 April 2021

